

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Antasari, Rina, dan Fauziah. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press, 2018.
- Harjono, Dhaniswara K. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2020.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Rusli, Tami. "Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga" 4, no. 1 (2009).
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suadi, Amran. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2022.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 2 ed. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2017.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tambunan, Toman Sony, dan Wilson Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

(BASYARNAS-MUI) Nomor: PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).

Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS-MUI).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Standar Prosedur Operasi Nomor SOP-MUI-BSY/01 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Prosedur Penanganan Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis

Fattamazaya, Ricky. "Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

Variza, Vinny Arviani. "Kekuatan Mengikat Putusan BASYARNAS dalam

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah.”
Universitas Islam Indonesia, 2011.

6. Website

BASYARNAS-MUI. “Basyarnas-MUI: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Adil, Cepat, dan Terjangkau,” 2023. <https://basyarnas-mui.org/2023/05/01/basyarnas-mui-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-yang-adil-cepat-dan-terjangkau/>.

“JASA BASYARNAS-MUI,” 2025. <https://basyarnas-mui.org/jasa-2/>.

“Permohonan Arbitrase ke Sekretariat BASYARNAS-MUI,” 2025. <https://basyarnas-mui.org/arbitrase-2/>.

“Q&A,” 2025. <https://basyarnas-mui.org/q-a/>.

“Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” 2025. <https://basyarnas-mui.org/sejarah/>.

BASYARNAS-MUI. “Visi & Misi,” 2024. <https://basyarnas-mui.org/visi-misi/>.